

**PERANAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG
DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
(Suatu studi di Kampung Sidey Distrik Sidey Kabupaten Manokwari)**

Yusup Awopi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam
Ratulangi Manado

Abstrak

Provinsi Papua merupakan salah satu Provinsi yang diberikan Otonomi Khusus lewat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Tujuan pemberian Otonomi ini masih sama, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan yang serasi antara pusat dan daerah, dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka diamanatkan untuk membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Majelis Rakyat Papua, dewan adat, dan Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) sebagai lembaga dari rakyat ditingkat daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai tingkat Kampung/kampung.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa para personil Badan Perwakilan Kampung Sidey belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta pedoman-pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Perwakilan Kampung itu sendiri, selain itu fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada, yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembuatan peraturan kampung, dan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung.

Key words: Badan Perwakilan Kampung, Pemerintahan Kampung

Pendahuluan

Pemerintahan Kampung seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, terdiri dari Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung. Petunjuk teknis pelaksanaan Pemerintahan Kampung dan Badan Perwakilan Kampung di perinci sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung, pasal 1 ayat 5; yang dimaksud dengan Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan Badan Perwakilan Kampung, sebagai wujud dari implementasi otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Berdasarkan dengan realita yang ada di lapangan (hasil observasi awal), ditemukan bahwa peran Badan Perwakilan Kampung yang ada di distrik Sidey belum maksimal. Alasan ini diperkuat dengan bukti-bukti yang ada dilapangan, dimana pemahaman tentang tugas dan fungsi dari Badan Perwakilan Kampung yang masih rendah, kurangnya pengetahuan untuk merumuskan/tahap-tahap pembuatan peraturan kampung, kurangnya pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan kampung, kurangnya pengetahuan untuk dapat bersama-sama dengan kepala kampung menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, dan faktor-faktor lainnya seperti pemenuhan kebutuhan hidup bagi setiap personil Badan Perwakilan Kampung, dimana setiap hari harus berhadapan dengan pekerjaan bercocok tanam, dan menjual hasil kebun, sehingga tidak ada waktu untuk dapat bersama-sama dengan kepala kampung merumuskan atau mebicarakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung, seperti membuat peraturan kampung, mendiskusikan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat, bahkan beberapa kali tanpa ada musyawarah dan sosialisasi Badan Perwakilan

Kampung langsung menyetujui draft/rancangan peraturan Kampung, dengan alasan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi, melalui suatu penelitian, dengan menggunakan kaidah Ilmiah untuk membahas mengenai Peran Badan Perwakilan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung Sidey.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peranan Badan Perwakilan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Sidey?, Apa saja hambatan Badan Perwakilan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung?

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Badan Perwakilan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, menetapkan peraturan kampung, bersama-sama dengan kepala kampung, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat kampung.

Pembahasan

Dalam suatu organisasi/lembaga keberhasilan pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada didalamnya, dalam hal ini personil Badan Perwakilan Kampung yang memiliki kualitas sumber daya manusia yaitu kemampuan menanggapi berbagai macam permasalahan yang terjadi di masyarakat dan menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya. Dengan kata lain bahwa faktor sumber daya manusia mempunyai penentudalam meningkatkan peranan, terutama yang menyangkut dengan hasil kerja, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya masing-masing, mampu bersaing dalam era

globalisasi dalam pencapaian tujuan yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Kemampuan dan motivasi berimplikasi langsung dengan peranan baperkam. Secara psikologis, kemampuan personil baperkam terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan reality. Artinya personil baperkam yang memiliki potensi (IQ) diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan trampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Kemudian motivasi terbentuk dari sikap seseorang personil baperkam dalam menghadapi situasi kerja, fisik/tubuh, tujuan dan situasi lingkungan. Motif berprestasi ini yang mendorong sehingga personil baperkam dapat melakukan suatu tugas atau kegiatan, dengan sebaik-baiknya.

Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Baperkam

Pendidikan dan pelatihan sering dibedakan satu sama lainnya, namun pada prinsipnya keduanya adalah berhubungan dengan pemberian bantuan kepada seseorang agar dapat berkembang tingkat kecerdasan, kemampuan dan pengetahuan yang lebih tinggi.

Pelatihan berorientasi pada penerapan dengan segera dari pada pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, dimana latihan adalah bagian dari pada pendidikan yang sifatnya non formal yang merupakan proses belajar untuk memperoleh atau meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang penyelenggaraannya berlangsung diluar sitem pendidikan sekolah dan dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori. Buchari (1993:71) berpendapat bahwa aspek-aspek tertentu yang pendidikan dan ketrampilan perlu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pekerja. Hal ini jelas dimaksud agar kontribusi pendidikan nantinya bisa berdampak langsung bagi peningkatan hasil pekerjaan itu sendiri.

Peranan Badan Perwakilan Kampung, sebagai mitra kerja Pemerintah Kampung sampai sejauh ini sudah cukup baik, dalam bekerja sama dengan Pemerintah Kampung guna meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat setempat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang nomopr 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yaitu: peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan yang serasi antara Pusat dan Daerah, serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan perempuan serta pemerintah setempat.

Keputusan politik penyatuan papua menjadi bagian dari NKRI pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur, namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, penegakkan hukum, penghormatan hak asasi manusia. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan social politik.

Berdasarkan hasil penelitian, perlu adanya perhatian dari Badan Perwakilan Kampung, bahkan pemerintah kampung untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya yaitu: bersama dengan kepala kampung menetapkan peraturan kampung serta menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat, agar supaya bisa menjawab semua kebutuhan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat kampung sidey.

Baperkam sebagai lembaga perwakilan yang ada di

kampung memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan kampung. Oleh karena itu kehadiran baperkam diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun kampung serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah kampung.

Walaupun Badan Perwakilan Kampung memiliki tugas dan fungsi dalam mendorong kelancaran pemerintahan kampung namun Badan Perwakilan Kampung juga memiliki kendala dalam usaha pelaksanaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Badan Perwakilan Kampung dalam proses pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa antara lain:

1. Sikap Mental

Masalah sikap mental bagi anggota Badan Perwakilan Kampung dirasa penting untuk diangkat mengingat sebagian anggota Badan Perwakilan Kampung memiliki sikap mental yang kurang baik.

2. Sosialisasi Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perwakilan Kampung

Masih ada sebagian anggota Badan Perwakilan Kampung yang belum memahami betul apa tugas dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini muncul karena adanya ketidaktahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud.

3. Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/Tradisi

Adat istiadat atau kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek moyang terdahulu sampai kini masih dibawa oleh sebagian anggota Badan Perwakilan Kampung, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang menghargai waktu, tidak berdisiplin masih saja tampak dalam sikap yang tercermin dari para anggota Badan Perwakilan Kampung. Dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Perwakilan Kampung maka perlu diupayakan adat istiadat yang memiliki makna yang positif dalam pembangunan kampung.

4. Faktor Tanggung Jawab

Salah satu kendala yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Perwakilan Kampung adalah kurangnya tanggung jawab. Padahal masalah tanggung jawab ini dianggap penting. Oleh karena itu diharapkan bagi para anggota Badan Perwakilan Kampung harus perlu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya tanggung jawab ini dapat dicerminkan melalui datang terlambat apabila diundang rapat, meriunda tugas-tugas yang diberikan, dan lain-lain.

5. Keahlian dan Ketrampilan

Masalah keahlian dan ketrampilan ini juga menjadi penghambat bagi anggota Badan Perwakilan Kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketrampilan seperti cara membuat Peraturan Kampung, menggali potensi kampung mampu memimpin rapat-rapat kampung, mengajukan pendapat dan memberikan saran yang positif harus perlu dimiliki oleh para anggota Badan Perwakilan Kampung.

6. Sarana dan Prasarana.

Masalah sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang turut mendapat perhatian, misalnya pengadaan peralatan seperti mesin ketik alat tulis, buku-buku petunjuk buku administrasi, dan lain-lain akan sangat diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas bagi anggota Badan Perwakilan Kampung itu sendiri.

7. Kendala dari perangkat Kampung

perangkatkampung yang merasa takut dengan diadakannya Badan Perwakilan Kampung ini untuk melakukan berbagai intervensi kegiatan guna mengeliminir akibat-akibat yang mungkin terjadi.

8. Kendala dari Masyarakat

Kendala yang ada dalam masyarakatpun ada dua pertama kurangnya ketertarikan masyarakat dalam bidang politik. Banyak masyarakat yang kurang tertarik dibidang politik bila dibandingkan dengan masalah ekonomi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemahaman Badan Perwakilan Kampung terhadap tugas dan fungsinya masih belum maksimal, hal ini terungkap dalam hasil penelitian, dimana kurangnya petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah kabupaten manokwari, serta sosialisasi dan dokumen-dokumen petunjuk yang masih minim diterima oleh baperkam.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tahapan-tahapan pembuatan peraturan kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Badan Perwakilan Kampung Sidey dirasa sangat kurang, hal ini dibuktikan dengan baru diterbitkannya 2 (dua) peraturan kampung, dan belum pernah ada Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung Sidey sampai dengan saat ini.

Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Manokwari harus lebih maksimal lagi dalam memberikan pemahaman, mengenai tugas dan fungsi Badan Perwakilan Kampung sesuai yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari nomor 8 Tahun 2003, melalui pendidikan dan latihan, disertai juga dengan pemberian materi tertulis secara terperinci untuk dijadikan dokumen, dan bahan bagi personil baperkam.
2. Mengadakan work shop bagi semua personil baperkam dalam pembuatan / tahapan-tahapan pembuatan peraturan kampung maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 1995, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara Jakarta.
- Azwar Saifuddi, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Bareint, 1996, *Sosiologi Pekampungan Suatu Pengantar*, Grafindo Persada Jakarta.
- Cristina Anita, 2001, *Jaman Daulat Rakyat, Dari Otonomi Daerah Ke Demokratisasi*, Tim Laper Pustaka Utama Jakarta.
- Dadang Juliantara, 2000, *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Kampung*, Penerbit Tim Laper.
- Hasan Fachri 2002, *Managemen Sumberdaya Manusia*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- Himawan S. Pambudi, 2003, *Jalan Baru Keadilan, Dokumen pertemuan Konsolidasi Pembaruan Kampung*.
- Hotman Siahaan, 2001, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Penerbit Rosdakarya Bandung.
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara Jakarta.
- Miles dan Hubberman, 1992, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gunung Agung, Jakarta
- Owin Jamasy, 2004, *Keadilan Pemberdayaandan penanggulangan Kemiskinan* Penerbit Blantika Jakarta.
- Pamudji, 1995, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara Jakarta.
- Purwo Santoso, 2003, *Merubah Watak Negara Strategi Penguatan Partisipasi Kampung*, Tim Laper Pustaka Utama Jakarta.
- Pujo Suharso, 2002, *Tanah Petani Politik Pekampungan*, Penerbit Pondok Edukasi Jakarta.
- Saparin, 1986, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Kampung*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Siagian, 1996, *Sistim Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta.

Suparyogo,2001,Metode Penelitian Sosial,Penerbit CV Rajawali Jakarta.
Suharto 2001,Otonomi Kampung dan Pemberdayaan,Penerbit Tim Laper
Jakarta.
Syamsi Ibnu,2000,Administrasi Dan Managemen Penerbit CV Rajawali Jakarta.
Timur Mahardika,2001,Pendidikan PolitikPemberdayaan Kampung Panduan
Praktisi,Penerbit Tim Lapera Pustaka Utama Jakarta.
Toha Miftha, 1995, Kepemimpinan Manajemen dalam Suatu Tindakan Prilaku,
PT Eraja Grafindo Persada Jakarta.
Widjaya,2003,Pemerintahan KampungBerdasarkan UU No. 22 tahun 1999,Suatu
Telaah Administrasi Negara.

Sumber-Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
Perda Kabupaten Manokwari No.7 Tahun 2003, Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan Kampung
Perda Kabupaten Manokwari No 8 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Badan
Perwakilan Kampung